

Analysis Of Accountability In The Management Of Special Autonomy Scholarship Funds For Medical Students At Universitas Cenderawasi

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Beasiswa Otonomi Khusus Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih

Willem Waroy^{1*}, Agustinus Salle², Syaikhul Falah³

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia^{1,2,3}

Wellemeleztun@gmail.com¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of the Special Autonomy (OTSUS) scholarship fund management for medical students at the Faculty of Medicine, Universitas Cenderawasih. The Otsus scholarship is an affirmative policy implemented by the local government to enhance access to higher education and strengthen human resources in the health sector in Papua. This research employs a mixed methods approach with a descriptive design. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 50 respondents consisting of active students and alumni who are scholarship recipients, while qualitative data were obtained through in-depth interviews and document analysis of relevant policies and reports. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and the independent sample t-test, whereas qualitative data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results show that, overall, the accountability of the Otsus scholarship management is in the good category. The outcome accountability dimension achieved the highest score, indicating that the scholarship program has a significant impact on academic progress, learning motivation, and graduates' readiness to serve. Meanwhile, financial accountability is the weakest dimension, particularly in terms of disbursement timeliness and information transparency. Process and policy accountability are categorized as high; however, they still show weaknesses in coordination, monitoring, and post-graduation policy clarity. The independent sample t-test results indicate that there is no significant difference in perceptions between active students and alumni across all accountability dimensions. In conclusion, the Otsus scholarship management has provided substantial benefits to recipients; however, it still requires strengthening in governance aspects, particularly transparency, timely fund disbursement, data integration, and policy sustainability. Strengthening these aspects is essential to ensure that the scholarship program operates more effectively, accountably, and contributes optimally to the provision of medical doctors in Papua.

Keywords: *accountability, Special Autonomy scholarship, mixed methods, medical education, Papua*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus (OTSUS) bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih. Beasiswa Otsus merupakan kebijakan afirmatif pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akses pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia kesehatan di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain deskriptif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner terhadap 50 responden yang terdiri dari mahasiswa aktif dan alumni penerima beasiswa, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam serta analisis dokumen kebijakan dan laporan terkait. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji beda independent sample t-test, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum akuntabilitas pengelolaan beasiswa Otsus berada pada kategori baik. Dimensi akuntabilitas hasil memperoleh nilai tertinggi dan menunjukkan bahwa program beasiswa memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran studi, motivasi belajar, dan kesiapan pengabdian lulusan. Sementara itu, dimensi akuntabilitas keuangan menjadi aspek dengan nilai terendah, terutama pada indikator ketepatan waktu pencairan dana dan transparansi informasi. Dimensi proses dan kebijakan berada pada kategori tinggi namun masih menunjukkan kelemahan pada aspek koordinasi, monitoring,

serta kejelasan kebijakan pasca kelulusan. Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa aktif dan alumni terhadap seluruh dimensi akuntabilitas. Kesimpulannya, pengelolaan beasiswa Otonomi Khusus telah memberikan manfaat yang kuat bagi penerima, namun masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola, khususnya transparansi, ketepatan pencairan dana, integrasi data, dan kebijakan keberlanjutan. Penguatan aspek tersebut diperlukan agar program beasiswa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkontribusi optimal terhadap penyediaan tenaga dokter di Papua.

Kata kunci: akuntabilitas, beasiswa Otonomi Khusus, mixed methods, pendidikan kedokteran, Papua

1. Introduction

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan instrumen afirmatif negara untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat Papua. Dalam kerangka tersebut, Dana Otonomi Khusus tidak hanya diposisikan sebagai transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang harus diarahkan pada sektor-sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan akses layanan publik. Namun, besarnya alokasi dana publik tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pembangunan apabila tidak disertai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil. Dalam konteks Papua, studi Agustinus (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan masih menghadapi persoalan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Temuan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi prasyarat penting agar dana afirmatif benar-benar menghasilkan manfaat bagi kelompok sasaran.

Salah satu bentuk penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan dan kesehatan adalah program beasiswa bagi mahasiswa kedokteran. Program ini memiliki makna strategis karena pendidikan kedokteran membutuhkan biaya tinggi, durasi studi yang panjang, dan dukungan akademik yang berkelanjutan. Bagi mahasiswa Papua, khususnya yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau wilayah dengan akses pendidikan terbatas, beasiswa menjadi instrumen penting untuk memperluas kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Bukti empiris dari penelitian Mulyaningsih, Dong, Miranti, Daly, dan Purwaningsih (2022) menunjukkan bahwa program beasiswa yang ditargetkan secara tepat dapat berkontribusi terhadap capaian akademik mahasiswa di pendidikan tinggi. Dengan demikian, beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bantuan biaya, tetapi juga sebagai kebijakan investasi sumber daya manusia.

Urgensi beasiswa kedokteran di Papua semakin kuat jika dikaitkan dengan persoalan distribusi tenaga kesehatan. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan tenaga medis, terutama di wilayah timur, daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan karakter geografis sulit. Penelitian Noya, Carr, Thompson, Clifford, dan Playford (2021) menunjukkan bahwa latar belakang daerah, pengalaman pendidikan di wilayah rural, dan keterikatan dengan daerah asal berhubungan dengan minat dokter untuk bekerja dan bertahan di wilayah rural dan remote. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Kurniati et al. (2024), yang menyatakan bahwa retensi tenaga medis di daerah terpencil tidak cukup hanya ditopang oleh insentif keuangan, tetapi juga membutuhkan dukungan keamanan, fasilitas kerja, pengembangan profesional, dan kebijakan penempatan yang jelas. Dalam konteks ini, beasiswa kedokteran bagi mahasiswa Papua menjadi kebijakan yang relevan karena berpotensi mencetak tenaga medis lokal yang memiliki kedekatan sosial, kultural, dan geografis dengan wilayah pelayanan.

Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih memiliki posisi penting dalam agenda tersebut karena menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang berperan dalam menyiapkan tenaga dokter bagi Papua. Melalui dukungan beasiswa Otonomi Khusus, mahasiswa kedokteran

diharapkan dapat menyelesaikan studi dengan baik dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga medis di daerah. Data Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih menunjukkan bahwa jumlah penerima beasiswa Otonomi Khusus mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yaitu 80 orang pada 2020, 72 orang pada 2021, 65 orang pada 2022, 70 orang pada 2023, dan 68 orang pada 2024. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa program beasiswa belum menunjukkan pola distribusi yang stabil. Kondisi ini penting untuk dianalisis karena ketidakstabilan jumlah penerima dapat berkaitan dengan perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, mekanisme seleksi, atau persoalan administratif dalam pengelolaan program.

Persoalan utama dalam pengelolaan beasiswa publik bukan hanya terletak pada tersedianya dana, tetapi pada bagaimana dana tersebut direncanakan, disalurkan, diawasi, dan dievaluasi. Dalam perspektif akuntabilitas publik, pengelola program memiliki kewajiban untuk menjelaskan penggunaan sumber daya, proses pengambilan keputusan, capaian hasil, dan kesesuaian kebijakan kepada pihak yang berhak menilai atau mengawasi. Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum, yaitu aktor berkewajiban menjelaskan tindakan, sedangkan forum memiliki hak untuk menilai dan memberikan konsekuensi. Kerangka ini relevan digunakan dalam pengelolaan beasiswa Otonomi Khusus karena melibatkan pemerintah daerah sebagai penyedia dan pengelola anggaran, universitas sebagai institusi akademik, serta mahasiswa dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam praktiknya, akuntabilitas pengelolaan beasiswa dapat dilihat melalui beberapa dimensi. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan ketepatan penggunaan anggaran, kejelasan jumlah dana, ketepatan waktu pencairan, serta pelaporan dana. Akuntabilitas proses berkaitan dengan kejelasan kriteria penerima, keadilan seleksi, kemudahan prosedur, dan komunikasi antara pengelola dan penerima. Akuntabilitas hasil berkaitan dengan manfaat beasiswa terhadap kelancaran studi, penyelesaian pendidikan, motivasi akademik, dan kesiapan lulusan untuk mengabdikan. Sementara itu, akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kesesuaian program beasiswa dengan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Papua, termasuk kejelasan kebijakan pasca-studi seperti ikatan dinas atau mekanisme pengabdian. Dengan demikian, akuntabilitas beasiswa tidak cukup dinilai dari sisi administrasi keuangan, tetapi juga harus dilihat dari manfaat substantif dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan.

Selain teori akuntabilitas, teori agensi juga relevan untuk menjelaskan potensi masalah dalam pengelolaan beasiswa. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu pihak memberikan mandat kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Dalam konteks beasiswa Otonomi Khusus, pemerintah daerah dapat dipahami sebagai principal yang mengalokasikan dana publik, sedangkan pengelola program, institusi pendidikan, dan penerima beasiswa berada dalam relasi keagenan yang menuntut mekanisme pengawasan. Ketika informasi tidak tersebar secara merata, prosedur tidak jelas, atau monitoring lemah, maka potensi asimetri informasi, moral hazard, dan ketidaktepatan sasaran dapat muncul. Oleh karena itu, transparansi data penerima, sistem pelaporan, dan evaluasi berkala menjadi komponen penting dalam memperkuat akuntabilitas program.

Teori legitimasi juga memperkuat pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan beasiswa. Suchman (1995) menegaskan bahwa legitimasi organisasi atau kebijakan terbentuk ketika tindakan suatu institusi dipandang sesuai dengan norma, nilai, dan harapan sosial. Dalam konteks Dana Otonomi Khusus, legitimasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menilai dana tersebut dikelola secara adil, transparan, dan memberi manfaat nyata. Jika informasi mengenai seleksi, pencairan, dan evaluasi beasiswa tidak tersedia secara terbuka, maka kepercayaan penerima manfaat dan publik dapat menurun. Sebaliknya, tata kelola yang akuntabel dapat memperkuat legitimasi kebijakan Otonomi Khusus, terutama karena program beasiswa kedokteran berkaitan langsung dengan kebutuhan strategis masyarakat Papua terhadap pelayanan kesehatan.

Kajian sebelumnya mengenai Dana Otonomi Khusus Papua lebih banyak menyoroti aspek tata kelola fiskal, pembangunan daerah, infrastruktur, pelayanan publik, dan akuntabilitas dana pada tingkat makro. Penelitian Agustinus (2013) telah mengkaji akuntabilitas dana pendidikan Otonomi Khusus di Papua, sedangkan Prabowo, Supriyono, Noor, dan Muluk (2021) menilai kebijakan Otonomi Khusus Papua dari perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kajian yang secara spesifik membahas akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus bagi mahasiswa kedokteran masih terbatas. Padahal, beasiswa kedokteran memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan pendidikan profesi, kebutuhan tenaga medis daerah, biaya studi tinggi, dan konsekuensi kebijakan pasca-kelulusan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, khususnya pada aspek keuangan, proses, hasil, dan kebijakan. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala utama dalam tata kelola beasiswa serta merumuskan alternatif perbaikan yang dapat memperkuat efektivitas program. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akuntabilitas pengelolaan dana publik pada sektor pendidikan tinggi dan kesehatan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, universitas, dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola beasiswa Otonomi Khusus agar lebih transparan, tepat sasaran, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pengembangan tenaga dokter di Papua.

2. Literature Review

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola sektor publik karena berkaitan dengan kewajiban aktor publik untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka ruang evaluasi atas tindakan serta penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Dalam konteks administrasi publik, Romzek dan Dubnick (1987) menjelaskan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban organisasi publik untuk memenuhi harapan pihak yang memiliki otoritas, baik secara birokratis, legal, profesional, maupun politis. Perspektif ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku organisasi publik.

Bovens (2007) memperluas pemahaman tersebut dengan menjelaskan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum. Aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan tindakan atau keputusan yang diambil, sedangkan forum memiliki hak untuk menilai, mengevaluasi, dan memberikan konsekuensi. Konsep ini relevan dalam pengelolaan dana beasiswa karena program beasiswa menggunakan dana publik dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran, universitas sebagai institusi akademik, hingga mahasiswa sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, pengelolaan beasiswa tidak cukup hanya dinilai dari tersalurkannya dana, tetapi juga dari keterbukaan proses, ketepatan sasaran, capaian hasil, dan kesesuaian program dengan tujuan kebijakan.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas dipahami melalui empat dimensi utama, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas proses, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan kejelasan alokasi dana, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu pencairan, dan pelaporan penggunaan dana. Akuntabilitas proses mencakup keterbukaan informasi, kejelasan kriteria penerima, keadilan seleksi, kemudahan prosedur, serta monitoring dan evaluasi. Akuntabilitas hasil menekankan pada manfaat program terhadap kelancaran studi, penyelesaian pendidikan, motivasi akademik, dan kontribusi lulusan. Sementara itu, akuntabilitas kebijakan menilai kesesuaian program beasiswa dengan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Papua serta keberlanjutan kebijakan pasca-kelulusan.

Teori Agensi dalam Pengelolaan Beasiswa

Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat dan pihak yang diberi mandat dalam pengelolaan sumber daya. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika principal memberikan wewenang kepada agent untuk bertindak atas nama principal. Dalam hubungan tersebut, persoalan dapat muncul apabila agent memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan principal, sehingga menimbulkan asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan.

Eisenhardt (1989) menegaskan bahwa masalah agensi dapat dikendalikan melalui mekanisme monitoring, sistem pelaporan, insentif, dan pengaturan kontrak yang jelas. Dalam pengelolaan beasiswa Otonomi Khusus, teori ini relevan karena pemerintah daerah berperan sebagai pengelola dana publik, sedangkan universitas dan mahasiswa penerima beasiswa berada dalam relasi implementasi kebijakan. Apabila proses seleksi, pencairan, dan evaluasi tidak dilakukan secara terbuka, maka potensi asimetri informasi dapat meningkat. Bentuknya dapat berupa ketidakjelasan kriteria penerima, keterlambatan pencairan, lemahnya pengawasan akademik, atau tidak adanya kejelasan kewajiban pengabdian setelah lulus.

Dengan demikian, teori agensi memberikan dasar konseptual bahwa pengelolaan beasiswa harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang memadai. Monitoring akademik, basis data penerima yang terintegrasi, pelaporan berkala, serta perjanjian kewajiban pasca-studi menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko moral hazard. Dalam konteks beasiswa kedokteran, aspek ini menjadi semakin penting karena dana yang digunakan tidak hanya bertujuan membantu mahasiswa secara individual, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Papua.

Teori Legitimasi dan Kepercayaan Publik

Selain teori agensi, teori legitimasi juga relevan untuk menjelaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan suatu organisasi dianggap sesuai dengan norma, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat. Legitimasi tidak melekat secara otomatis pada suatu lembaga atau kebijakan, tetapi harus dipertahankan melalui tindakan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, legitimasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat melihat bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Jika program beasiswa dikelola secara tertutup, tidak tepat waktu, atau tidak memiliki dasar seleksi yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap program dapat menurun. Sebaliknya, apabila pengelolaan dilakukan secara terbuka dan menghasilkan manfaat nyata, maka legitimasi kebijakan Otonomi Khusus akan semakin kuat.

Teori legitimasi menempatkan transparansi sebagai unsur penting dalam mempertahankan penerimaan sosial terhadap kebijakan publik. Dalam konteks beasiswa kedokteran, legitimasi program tidak hanya ditentukan oleh jumlah mahasiswa yang menerima bantuan, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi bagi pelayanan kesehatan di Papua. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan, proses, hasil, dan kebijakan merupakan bagian dari upaya mempertahankan legitimasi publik terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Pendidikan Kedokteran

Dana Otonomi Khusus Papua merupakan instrumen fiskal afirmatif yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan. Salah satu sektor prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks tersebut, program beasiswa bagi mahasiswa kedokteran memiliki kedudukan strategis karena berada pada irisan antara kebijakan pendidikan tinggi dan kebijakan penguatan sumber daya manusia kesehatan.

Agustinus (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan di Papua masih menghadapi persoalan akuntabilitas, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dana afirmatif membutuhkan sistem tata kelola yang kuat agar tidak berhenti pada aspek penyerapan anggaran. Prabowo, Supriyono, Noor, dan Muluk (2021) juga menekankan bahwa efektivitas kebijakan Otonomi Khusus Papua sangat bergantung pada kemampuan kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara nyata.

Dalam kaitannya dengan pendidikan tinggi, Mulyaningsih, Dong, Miranti, Daly, dan Purwaningsih (2022) menemukan bahwa beasiswa yang ditargetkan kepada mahasiswa dari kelompok kurang mampu dapat berkontribusi terhadap peningkatan capaian akademik. Hal ini menunjukkan bahwa beasiswa dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya bagi kelompok yang menghadapi hambatan ekonomi. Namun, efektivitas beasiswa sangat bergantung pada ketepatan sasaran, keberlanjutan pendanaan, dan sistem pendampingan penerima.

Konteks pendidikan kedokteran memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan program studi umum. Pendidikan kedokteran membutuhkan biaya yang besar, masa studi yang panjang, dan proses pendidikan profesi yang menuntut dukungan akademik serta finansial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlambatan pencairan atau ketidakjelasan kebijakan beasiswa dapat berdampak langsung pada kelancaran studi mahasiswa. Dalam konteks Papua, dukungan beasiswa kedokteran menjadi semakin penting karena lulusan kedokteran diharapkan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan tenaga dokter di daerah.

Beasiswa Kedokteran dan Kebutuhan Tenaga Medis di Daerah Terpencil

Isu distribusi tenaga medis merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Noya, Carr, Thompson, Clifford, dan Playford (2021) menunjukkan bahwa daerah rural dan remote menghadapi persoalan kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga medis. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa latar belakang daerah, pengalaman pendidikan di wilayah terpencil, dan keterikatan sosial dengan daerah asal dapat memengaruhi minat tenaga medis untuk bekerja di wilayah rural dan remote.

Putri et al. (2021) juga menemukan bahwa strategi membangun tenaga medis untuk daerah terpencil dapat diperkuat melalui seleksi mahasiswa dari latar belakang daerah terpencil, pemberian beasiswa, pengalaman klinik di daerah terpencil, dan insentif finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa beasiswa kedokteran tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga dapat menjadi instrumen kebijakan untuk membangun ketersediaan tenaga kesehatan lokal. Dengan demikian, program beasiswa kedokteran Otonomi Khusus di Papua memiliki relevansi langsung dengan agenda pemerataan tenaga medis.

Kurniati et al. (2024) menambahkan bahwa retensi tenaga medis di daerah terpencil membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih luas, termasuk jaminan keamanan, fasilitas kerja, pengembangan karier, dan dukungan pemerintah daerah. Artinya, beasiswa kedokteran perlu dihubungkan dengan kebijakan pasca-kelulusan yang jelas. Apabila mahasiswa telah menerima beasiswa tetapi tidak ada mekanisme pengabdian, penempatan, atau dukungan karier setelah lulus, maka kontribusi program terhadap pemenuhan tenaga dokter di Papua dapat menjadi kurang optimal.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Papua umumnya berfokus pada tata kelola fiskal, pembangunan daerah, dan efektivitas kebijakan pada tingkat makro. Agustinus (2013) meneliti akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan di Papua dan menemukan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap dana

tersebut, tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Agustinus (2015) juga menyoroti pentingnya kepatuhan regulasi, pelaksanaan, dan pelaporan dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua. Sementara itu, Prabowo et al. (2021) menilai kebijakan Otonomi Khusus Papua dari perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi lain, penelitian mengenai beasiswa pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa bantuan pendidikan dapat meningkatkan akses dan capaian akademik mahasiswa apabila dikelola secara tepat. Mulyaningsih et al. (2022) memberikan bukti bahwa beasiswa yang ditargetkan kepada mahasiswa dari kelompok kurang mampu dapat berdampak terhadap performa akademik. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak secara khusus membahas beasiswa Otonomi Khusus Papua maupun pendidikan kedokteran.

Kajian tentang tenaga medis di daerah terpencil juga telah menunjukkan pentingnya strategi rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan lokal. Noya et al. (2021), Putri et al. (2021), dan Kurniati et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan tenaga medis di daerah terpencil memerlukan pendekatan yang mencakup seleksi mahasiswa, dukungan beasiswa, pengalaman pendidikan di daerah terpencil, insentif, serta kebijakan retensi. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menghubungkan beasiswa Otonomi Khusus dengan akuntabilitas pengelolaan dana publik pada mahasiswa kedokteran di Papua.

Berdasarkan uraian tersebut, celah penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih. Padahal, program ini memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan tinggi, tetapi juga dengan kebutuhan tenaga dokter di Papua. Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menilai akuntabilitas pengelolaan beasiswa dari empat dimensi, yaitu keuangan, proses, hasil, dan kebijakan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dari teori akuntabilitas publik, teori agensi, dan teori legitimasi. Teori akuntabilitas digunakan sebagai dasar untuk menilai pertanggungjawaban pengelolaan dana beasiswa. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan potensi masalah yang muncul akibat asimetri informasi antara pemerintah daerah, pengelola program, universitas, dan mahasiswa penerima beasiswa. Sementara itu, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan bahwa keberlanjutan program beasiswa sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pengelolaannya.

Berdasarkan kerangka tersebut, akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus dalam penelitian ini dianalisis melalui empat dimensi. Pertama, akuntabilitas keuangan, yang mencakup kejelasan besaran dana, ketepatan waktu pencairan, kesesuaian jumlah beasiswa, dan pelaporan keuangan. Kedua, akuntabilitas proses, yang mencakup keterbukaan seleksi, kejelasan kriteria penerima, kemudahan prosedur, monitoring, dan komunikasi antara pengelola dengan penerima. Ketiga, akuntabilitas hasil, yang mencakup manfaat beasiswa terhadap kelancaran studi, penyelesaian pendidikan, motivasi akademik, dan kesiapan pengabdian. Keempat, akuntabilitas kebijakan, yang mencakup kesesuaian program dengan kebutuhan tenaga kesehatan di Papua, pemerataan distribusi tenaga medis, kejelasan ikatan dinas, dan keberlanjutan program.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menegaskan bahwa pengelolaan beasiswa Otonomi Khusus tidak dapat dinilai hanya dari aspek administratif. Program tersebut perlu dianalisis secara lebih luas sebagai instrumen kebijakan publik yang harus transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, akuntabilitas pengelolaan beasiswa menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia kesehatan dan upaya pemerataan pelayanan kesehatan di Papua.

3. Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode campuran (*mixed methods*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menggambarkan mekanisme pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus, tetapi juga menganalisis tingkat akuntabilitas berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Metode campuran memungkinkan peneliti mengintegrasikan data numerik dari kuesioner dengan data naratif dari wawancara dan dokumen, sehingga pemahaman terhadap fenomena yang diteliti menjadi lebih komprehensif (Johnson et al., 2007; Fetters et al., 2013).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif integratif. Data kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa aktif dan alumni penerima beasiswa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa. Sementara itu, data kualitatif digunakan untuk memperdalam penjelasan mengenai kendala, proses pengelolaan, dan upaya perbaikan tata kelola beasiswa. Integrasi kedua jenis data dilakukan pada tahap interpretasi hasil, yaitu dengan membandingkan temuan statistik deskriptif dan uji beda dengan hasil wawancara serta dokumen pendukung.

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua. Lokasi ini dipilih karena Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih merupakan salah satu institusi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Papua dan menjadi tempat studi mahasiswa penerima beasiswa Otonomi Khusus. Fokus penelitian diarahkan pada mahasiswa aktif penerima beasiswa dan alumni atau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang pernah menerima beasiswa Otonomi Khusus. Periode kajian mencakup tahun akademik 2020–2024, dengan mempertimbangkan dinamika pengelolaan beasiswa setelah perubahan regulasi Otonomi Khusus Papua.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif dan alumni penerima beasiswa Otonomi Khusus pada Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih. Populasi tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu mahasiswa aktif penerima beasiswa dan alumni penerima beasiswa. Pengelompokan ini dilakukan karena kedua kelompok memiliki pengalaman yang berbeda dalam menerima, menggunakan, dan menilai manfaat beasiswa. Mahasiswa aktif dapat memberikan penilaian terhadap proses pencairan, komunikasi, dan dukungan selama masa studi, sedangkan alumni dapat memberikan penilaian yang lebih luas terkait manfaat beasiswa, kelulusan, dan relevansi program terhadap kesiapan pengabdian.

Sampel kuantitatif dalam penelitian ini terdiri atas 50 responden, yaitu 14 mahasiswa aktif dan 36 alumni penerima beasiswa Otonomi Khusus. Penentuan responden dilakukan berdasarkan kriteria bahwa responden merupakan mahasiswa atau alumni Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang pernah menerima beasiswa Otonomi Khusus dan bersedia memberikan data penelitian. Sementara itu, informan kualitatif dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan beasiswa. Teknik purposive sampling relevan digunakan dalam penelitian kualitatif dan mixed methods karena memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki informasi paling sesuai dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Informan kualitatif meliputi unsur pengelola beasiswa, pihak fakultas/universitas, mahasiswa aktif, alumni, dan pihak terkait dalam pengelolaan program beasiswa.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden terhadap empat dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas proses, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas keuangan mencakup kejelasan informasi besaran beasiswa, ketepatan waktu pencairan, kesesuaian jumlah dana, dan pelaporan penggunaan dana. Akuntabilitas proses mencakup keadilan seleksi, kejelasan kriteria penerima, kemudahan prosedur pencairan, monitoring, dan komunikasi antara pengelola dengan penerima. Akuntabilitas hasil mencakup manfaat beasiswa

terhadap kelancaran studi, penyelesaian pendidikan, motivasi akademik, dan kesiapan pengabdian. Akuntabilitas kebijakan mencakup kesesuaian program dengan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Papua, pemerataan tenaga medis, kejelasan ikatan dinas, dan keberlanjutan program.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui kuesioner, terutama terkait kendala pencairan dana, transparansi informasi, monitoring penerima beasiswa, koordinasi antarinstansi, dan kebijakan pasca-kelulusan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Dokumen yang digunakan meliputi regulasi terkait Otonomi Khusus Papua, dokumen kebijakan beasiswa, data penerima beasiswa, laporan pengelolaan program, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Analisis dokumen digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data dari kuesioner dan wawancara, karena dokumen dapat memberikan bukti kontekstual terhadap proses dan kebijakan yang sedang diteliti (Bowen, 2009).

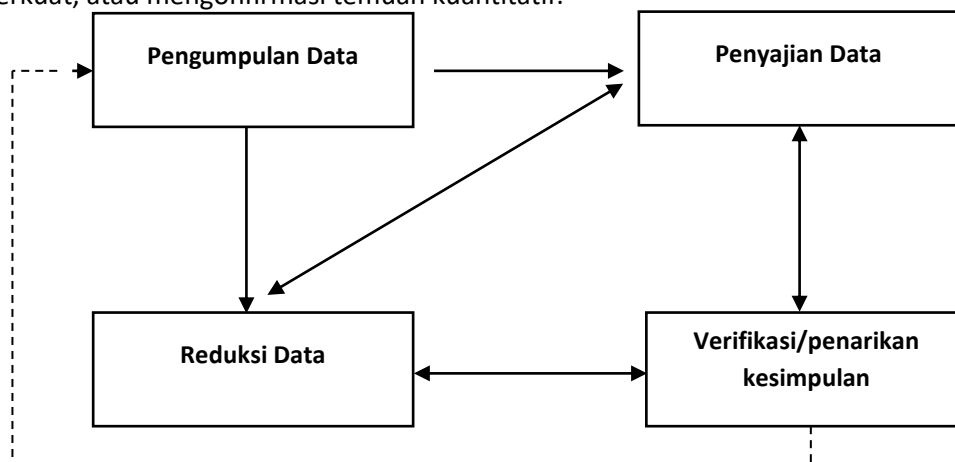
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif dan alumni penerima beasiswa Otonomi Khusus. Kedua, wawancara mendalam kepada informan kunci yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait pengelolaan beasiswa. Ketiga, dokumentasi terhadap regulasi, laporan, dan data administratif yang berkaitan dengan program beasiswa. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas temuan melalui triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena melalui pemanfaatan berbagai metode atau sumber data (Carter et al., 2014).

Analisis data kuantitatif dilakukan melalui statistik deskriptif dan uji beda *independent sample t-test*. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing dimensi akuntabilitas. Nilai rata-rata kemudian dikategorikan ke dalam lima tingkat penilaian, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Kategorisasi ini digunakan untuk memudahkan interpretasi persepsi responden terhadap akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa. Selanjutnya, *independent sample t-test* digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa aktif dan alumni terhadap dimensi akuntabilitas. Uji ini relevan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen, dengan memperhatikan asumsi normalitas, independensi data, dan kesamaan varians (Kim, 2015).

Dalam pelaksanaan *independent sample t-test*, pengujian diawali dengan Levene's Test untuk mengetahui homogenitas varians antar kelompok. Apabila nilai signifikansi Levene's Test lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok dianggap homogen dan interpretasi hasil uji t menggunakan baris *equal variances assumed*. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi Levene's Test lebih kecil dari 0,05, maka interpretasi hasil uji t menggunakan baris *equal variances not assumed*. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji beda adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa aktif dan alumni. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kedua kelompok.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup pengumpulan data, kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Data hasil wawancara dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan dan dibaca secara menyeluruh. Selanjutnya, data direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama terkait akuntabilitas keuangan, proses, hasil, kebijakan, dan kendala pengelolaan beasiswa. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan peneliti menemukan pola, hubungan, dan makna. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan temuan kuantitatif.

Selain mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña, analisis kualitatif juga menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola utama dari data wawancara. Analisis tematik relevan digunakan karena memungkinkan peneliti menemukan tema-tema penting yang muncul dari pengalaman informan, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan transparansi informasi, lemahnya monitoring, dan ketidakjelasan kebijakan ikatan dinas (Braun & Clarke, 2006). Hasil analisis kualitatif kemudian digunakan untuk menjelaskan, memperkuat, atau mengonfirmasi temuan kuantitatif.



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña

Keabsahan data kualitatif dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari mahasiswa aktif, alumni, pengelola beasiswa, dan dokumen kebijakan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan persepsi responden secara kuantitatif, tetapi juga mampu menjelaskan konteks dan penyebab munculnya masalah dalam pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus pada Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih.

4. Results and Discussions

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan alumni atau lulusan, yaitu sebanyak 36 orang atau 72,00%, sedangkan mahasiswa aktif berjumlah 14 orang atau 28,00%. Dari sisi jenis beasiswa, responden penerima beasiswa penuh berjumlah 27 orang atau 54,00%, sedangkan penerima beasiswa sebagian berjumlah 23 orang atau 46,00%. Sebaran asal daerah responden menunjukkan bahwa penerima beasiswa berasal dari beberapa kabupaten/kota di Papua, sehingga program ini tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Status responden	Mahasiswa aktif	14	28,00%
	Alumni/lulusan	36	72,00%
Jenis beasiswa	Beasiswa penuh	27	54,00%
	Beasiswa sebagian	23	46,00%
Asal daerah	Kota Jayapura	12	24,00%
	Keerom	8	16,00%
	Kepulauan Yapen	5	10,00%
	Supiori	4	8,00%

Sentani/Kabupaten Jayapura	7	14,00%
Sarmi	6	12,00%
Mamberamo Tengah	4	8,00%
Daerah lainnya	4	8,00%
Total	50	100,00%

Sebaran responden tersebut menunjukkan bahwa program beasiswa Otonomi Khusus memiliki jangkauan yang cukup luas. Dominasi responden dari Kota Jayapura, Keerom, dan Kabupaten Jayapura/Sentani dapat dipahami karena wilayah tersebut memiliki akses lebih dekat dengan pusat pendidikan tinggi di Papua. Namun, keberadaan responden dari daerah lain juga menunjukkan bahwa program beasiswa ini memiliki fungsi pemerataan akses pendidikan kedokteran bagi masyarakat Papua.

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kecenderungan penilaian responden terhadap empat dimensi akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa. Interpretasi nilai rata-rata menggunakan kategori: 1,00–1,80 sangat rendah; 1,81–2,60 rendah; 2,61–3,40 cukup; 3,41–4,20 tinggi; dan 4,21–5,00 sangat tinggi.

Tabel 2. Rata-Rata Variabel Penelitian

No.	Variabel	Mean	SD	Kategori
1	Akuntabilitas Keuangan	3,48	0,74	Tinggi
2	Akuntabilitas Proses	3,75	0,63	Tinggi
3	Akuntabilitas Hasil	4,27	0,58	Sangat tinggi
4	Akuntabilitas Kebijakan	4,02	0,55	Tinggi

Berdasarkan Tabel 2, seluruh dimensi akuntabilitas berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Dimensi dengan nilai rata-rata tertinggi adalah akuntabilitas hasil sebesar 4,27, sedangkan dimensi dengan nilai rata-rata terendah adalah akuntabilitas keuangan sebesar 3,48. Temuan ini menunjukkan bahwa program beasiswa dinilai sangat bermanfaat oleh penerima, tetapi masih menghadapi persoalan pada aspek tata kelola keuangan, terutama terkait ketepatan waktu pencairan dan keterbukaan informasi.

Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Keuangan

No.	Indikator	Mean	Kategori
1	Informasi besaran beasiswa disampaikan jelas dan terbuka	3,76	Tinggi
2	Penyaluran dana dilakukan tepat waktu sesuai jadwal	2,94	Cukup
3	Jumlah beasiswa sesuai ketentuan/dokumen resmi	3,70	Tinggi
4	Mengetahui adanya laporan/pertanggungjawaban penggunaan dana	3,64	Tinggi
5	Pengelolaan beasiswa sudah transparan	3,38	Cukup
Rata-rata variabel		3,48	Tinggi

Tabel 3 menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan memperoleh nilai rata-rata 3,48 dan berada pada kategori tinggi. Beberapa indikator, seperti kejelasan informasi besaran beasiswa, kesesuaian jumlah dana dengan ketentuan, serta adanya laporan atau pertanggungjawaban penggunaan dana, memperoleh penilaian tinggi. Namun, indikator ketepatan waktu penyaluran dana hanya memperoleh nilai 2,94 dan berada pada kategori cukup. Indikator transparansi pengelolaan beasiswa juga hanya memperoleh nilai 3,38 dan berada pada kategori cukup.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam dimensi keuangan bukan pada keberadaan dana, tetapi pada kepastian waktu pencairan dan keterbukaan informasi. Hasil

wawancara memperkuat temuan ini. Mahasiswa aktif menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana berdampak langsung pada kebutuhan akademik, terutama untuk pembayaran urusan kampus dan kebutuhan praktik. Salah satu informan mahasiswa menyampaikan:

“Yang tong rasa paling berat itu dana biasa terlambat cair. Kadang tong su butuh untuk bayar urusan kampus atau keperluan praktik, tapi beasiswa belum masuk. Jadi tong mahasiswa biasa bingung dan harus atur-atur lagi kebutuhan.”

Pandangan serupa disampaikan oleh perwakilan orang tua mahasiswa:

“Tong orang tua ini biasa paling bingung kalau dana belum jelas kapan cair. Anak-anak su bilang ada kebutuhan kuliah, tapi informasi yang tong dapat juga tidak pasti. Itu yang bikin tong rasa beban pikiran.”

Dari sisi pengelola, keterlambatan pencairan lebih banyak dikaitkan dengan proses verifikasi dan birokrasi penganggaran yang panjang. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ritme kebutuhan akademik mahasiswa dan ritme administrasi keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Visualisasi Hasil Wawancara pada Dimensi Akuntabilitas Keuangan Menggunakan Voyant Tools

Sumber: Hasil olahan peneliti menggunakan Voyant Tools, 2026.

Visualisasi hasil wawancara menunjukkan dominasi kata “dana”, “terlambat”, “informasi”, “kuliah”, “orang tua”, dan “mahasiswa”. Dominasi kata-kata tersebut memperkuat temuan bahwa isu utama dalam akuntabilitas keuangan berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana dan belum optimalnya keterbukaan informasi. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan masih perlu diperkuat melalui jadwal pencairan yang lebih pasti, sistem informasi yang terbuka, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses penerima manfaat.

Akuntabilitas Proses

Tabel 4. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Proses

No.	Indikator	Mean	Kategori
1	Proses seleksi dilakukan adil dan transparan	3,72	Tinggi
2	Kriteria penerima ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang jelas	3,34	Cukup
3	Prosedur pencairan mudah diakses dan dipahami	4,36	Sangat tinggi
4	Terdapat monitoring/evaluasi rutin terhadap penerima	3,48	Tinggi
5	Komunikasi antara pengelola dan penerima berjalan baik	3,87	Tinggi
	Rata-rata variabel	3,75	Tinggi

Tabel 4 menunjukkan bahwa akuntabilitas proses memperoleh rata-rata 3,75 dan berada pada kategori tinggi. Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemudahan prosedur pencairan, yaitu sebesar 4,36. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal responden memahami prosedur dasar pencairan beasiswa. Namun, indikator kriteria penerima ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang jelas hanya memperoleh nilai 3,34 dan berada pada kategori cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih mempertanyakan dasar penentuan penerima beasiswa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelemahan proses tidak terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum optimalnya integrasi data, komunikasi, dan koordinasi antar pihak. Salah satu informan pengelola menyatakan:

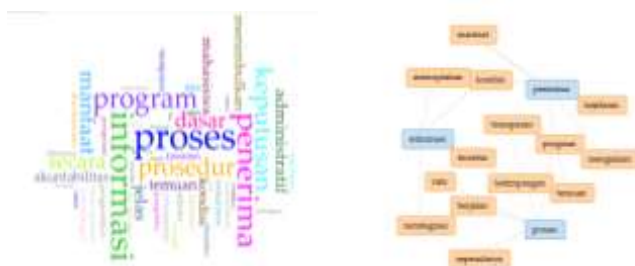
“Kalau aturan sebenarnya sudah ada dan jelas, tapi kendala sering terjadi pada data yang belum sinkron, jadi prosesnya harus menunggu atau disesuaikan lagi.”

Dari sisi fakultas, peran institusi pendidikan cenderung terbatas pada verifikasi administratif dan akademik. Hal ini menyebabkan fakultas tidak selalu dapat menjelaskan keseluruhan proses kepada mahasiswa. Salah satu informan menyampaikan:

“Kami di fakultas biasanya hanya verifikasi berkas akademik saja, sedangkan keputusan utama bukan di kami, jadi tidak semua bisa dijelaskan ke mahasiswa.”

Mahasiswa juga menyatakan bahwa informasi yang diterima sering tidak terpusat dan menimbulkan kebingungan:

“Kami ikut saja prosedur yang ada, tapi tidak semua jelas. Informasi yang diterima sering berbeda, jadi kami bingung sebenarnya alurnya bagaimana.”



Gambar 2. Visualisasi Hasil Wawancara pada Dimensi Akuntabilitas Proses

Sumber: Hasil olahan peneliti menggunakan Voyant Tools, 2026.

Visualisasi hasil wawancara memperlihatkan dominasi kata “proses”, “informasi”, “mahasiswa”, “data”, dan “tong”. Kata “proses” dan “informasi” menunjukkan bahwa masalah utama dalam dimensi ini berkaitan dengan kejelasan alur dan penyampaian informasi. Sementara itu, kemunculan kata “data” memperkuat temuan bahwa sinkronisasi data menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan program. Dengan demikian, perbaikan akuntabilitas proses perlu diarahkan pada integrasi basis data, kanal informasi resmi, dan mekanisme komunikasi yang konsisten antara pemerintah daerah, universitas, dan penerima beasiswa.

Akuntabilitas Hasil

Tabel 5. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Hasil

No.	Indikator	Mean	Kategori
1	Beasiswa membantu kelancaran studi	4,32	Sangat tinggi
2	Beasiswa memungkinkan menyelesaikan kuliah tepat waktu	4,10	Tinggi
3	Beasiswa meringankan beban keluarga	4,26	Sangat tinggi
4	Beasiswa memberi motivasi tambahan menyelesaikan studi	4,44	Sangat tinggi
5	Setelah lulus lebih siap mengabdikan sebagai dokter di Papua	4,23	Sangat tinggi
	Rata-rata variabel	4,27	Sangat tinggi

Tabel 5 menunjukkan bahwa akuntabilitas hasil memperoleh nilai rata-rata 4,27 dan berada pada kategori sangat tinggi. Dimensi ini merupakan aspek paling kuat dalam pengelolaan beasiswa Otonomi Khusus. Hampir seluruh indikator memperoleh nilai sangat tinggi, terutama indikator beasiswa memberi motivasi tambahan untuk menyelesaikan studi sebesar 4,44, beasiswa membantu kelancaran studi sebesar 4,32, dan beasiswa meringankan beban keluarga sebesar 4,26.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beasiswa memiliki dampak nyata terhadap keberlanjutan studi mahasiswa. Salah satu mahasiswa menyatakan:

monitoring. Keterlambatan pencairan dan lemahnya transparansi dalam penelitian ini memperkuat temuan tersebut, bahwa masalah akuntabilitas Dana Otonomi Khusus tidak hanya terjadi pada tingkat makro, tetapi juga tampak dalam pengelolaan program spesifik seperti beasiswa kedokteran.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program beasiswa tidak cukup diukur dari jumlah penerima atau jumlah dana yang dialokasikan. Program bantuan pendidikan harus mampu memberikan kepastian waktu karena kebutuhan akademik mahasiswa bersifat terjadwal. Keterlambatan dana dapat mengganggu pembayaran akademik, kebutuhan praktik, transportasi, tempat tinggal, serta kebutuhan belajar. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas keuangan perlu diarahkan pada perencanaan pencairan berbasis kalender akademik, transparansi informasi anggaran, dan mekanisme pemberitahuan resmi kepada penerima.

Akuntabilitas Proses: Prosedur Ada, tetapi Kejelasan Informasi Belum Merata

Akuntabilitas proses memperoleh nilai 3,75 dan berada pada kategori tinggi. Nilai tertinggi terdapat pada kemudahan prosedur pencairan, sedangkan nilai terendah terdapat pada kejelasan kriteria penerima. Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur formal telah tersedia, tetapi penerima manfaat belum sepenuhnya memahami dasar penentuan penerima, alur keputusan, dan sistem monitoring.

Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa relasi keagenan dapat menimbulkan masalah ketika pihak pengelola memiliki informasi lebih besar dibanding pihak yang terdampak oleh keputusan. Eisenhardt (1989) menegaskan bahwa masalah agensi dapat dikurangi melalui monitoring, pelaporan, insentif, dan mekanisme kontraktual yang jelas. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa dan orang tua berada pada posisi penerima manfaat yang tidak selalu memiliki akses penuh terhadap informasi seleksi dan pencairan, sedangkan pemerintah daerah dan pengelola program memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas proses tidak cukup hanya ditandai oleh keberadaan aturan. Aturan harus diikuti dengan komunikasi yang jelas, integrasi data, dan penjelasan yang mudah diakses oleh penerima. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustinus (2013), yang menekankan pentingnya mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dalam Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan di Papua. Ketika data penerima tidak sinkron dan informasi tidak terpusat, maka proses pengelolaan berisiko menimbulkan ketidakpastian dan persepsi ketidakadilan.

Dengan demikian, penguatan akuntabilitas proses perlu dilakukan melalui sistem data terpadu antara pemerintah daerah dan universitas, kanal informasi resmi, standar operasional prosedur yang mudah dipahami, serta monitoring akademik yang dilakukan secara berkala. Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih memiliki posisi strategis karena memiliki akses langsung terhadap perkembangan akademik mahasiswa penerima beasiswa. Oleh karena itu, universitas tidak hanya berperan sebagai verifikator administratif, tetapi juga sebagai mitra pengawasan akademik dalam keseluruhan siklus program.

Akuntabilitas Hasil: Manfaat Program Sangat Kuat bagi Mahasiswa dan Keluarga

Akuntabilitas hasil memperoleh nilai tertinggi, yaitu 4,27 dan berada pada kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa program beasiswa Otonomi Khusus memberikan manfaat nyata bagi penerima. Beasiswa membantu kelancaran studi, meringankan beban keluarga, meningkatkan motivasi belajar, dan memperkuat kesiapan mahasiswa untuk mengabdikan diri di Papua. Dengan demikian, secara substantif program ini memiliki legitimasi yang kuat di mata penerima manfaat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyaningsih et al. (2022), yang menunjukkan bahwa beasiswa pendidikan tinggi yang ditargetkan kepada mahasiswa dari kelompok kurang mampu berhubungan positif dengan performa akademik mahasiswa. Dalam konteks penelitian ini, manfaat beasiswa tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis dan akademik. Beasiswa memberikan rasa aman bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi dan mengurangi tekanan ekonomi keluarga.

Temuan ini juga relevan dengan isu penguatan tenaga medis di daerah terpencil. Noya et al. (2021) menunjukkan bahwa latar belakang daerah, pengalaman pendidikan, dan keterikatan dengan daerah asal berhubungan dengan kecenderungan dokter untuk bekerja dan bertahan di wilayah rural atau remote. Putri et al. (2021) juga menunjukkan bahwa pengalaman pendidikan dan paparan wilayah terpencil berhubungan dengan pilihan kerja dokter muda di daerah remote Indonesia. Oleh karena itu, beasiswa kedokteran bagi mahasiswa Papua dapat dipandang sebagai strategi *home-grown workforce development*, yaitu penguatan tenaga kesehatan lokal melalui pendidikan mahasiswa yang memiliki kedekatan sosial dan geografis dengan wilayah pelayanan.

Namun, tingginya akuntabilitas hasil tidak berarti seluruh tata kelola program sudah optimal. Justru hasil yang tinggi harus dijaga melalui penguatan dimensi lain. Apabila akuntabilitas keuangan dan proses tidak diperbaiki, manfaat program berisiko tidak berkelanjutan. Dengan demikian, capaian hasil yang baik perlu diikuti oleh sistem pencairan yang tepat waktu, monitoring akademik, serta kebijakan pasca-kelulusan yang jelas.

Akuntabilitas Kebijakan: Relevan bagi Papua, tetapi Ikatan Dinas Perlu Diperjelas

Akuntabilitas kebijakan memperoleh nilai 4,02 dan berada pada kategori tinggi. Responden menilai bahwa program beasiswa Otonomi Khusus sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Papua dan mendukung peningkatan jumlah dokter lulusan Universitas Cenderawasih. Temuan ini menunjukkan bahwa secara kebijakan, program beasiswa memiliki arah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan daerah.

Namun, nilai indikator kejelasan ikatan dinas masih paling rendah dibanding indikator kebijakan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara pemberian beasiswa dan kewajiban pengabdian setelah lulus belum sepenuhnya tegas. Padahal, dalam konteks beasiswa kedokteran, keberhasilan kebijakan tidak berhenti pada kelulusan mahasiswa, tetapi juga pada kontribusi lulusan terhadap pelayanan kesehatan di Papua.

Temuan ini berkaitan dengan penelitian Kurniati et al. (2024), yang menunjukkan bahwa retensi tenaga medis di daerah terpencil membutuhkan paket kebijakan yang komprehensif, mencakup jaminan keamanan, fasilitas kerja, pengembangan profesional berkelanjutan, dan insentif. Artinya, kewajiban ikatan dinas tidak cukup hanya dinyatakan secara administratif. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan kerja yang membuat lulusan bersedia dan mampu mengabdikan diri di Papua, terutama di daerah yang kekurangan tenaga dokter.

Dalam konteks kebijakan Otonomi Khusus, Prabowo et al. (2021) menekankan pentingnya evaluasi kebijakan Otonomi Khusus berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, beasiswa kedokteran seharusnya tidak hanya dievaluasi dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemerataan tenaga medis dan peningkatan layanan kesehatan. Tanpa desain pasca-kelulusan yang jelas, program beasiswa berisiko berhenti sebagai bantuan pendidikan individual dan belum sepenuhnya menjadi instrumen pembangunan kesehatan daerah.

Tidak Ada Perbedaan Persepsi antara Mahasiswa Aktif dan Alumni

Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa aktif dan alumni/lulusan pada seluruh dimensi akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman penerima beasiswa relatif konsisten, baik ketika masih

menjadi mahasiswa maupun setelah menjadi alumni. Mahasiswa aktif dan alumni sama-sama menilai bahwa program sangat bermanfaat, tetapi masih menghadapi persoalan pada pencairan, transparansi, komunikasi, monitoring, dan kejelasan kebijakan pengabdian.

Tidak adanya perbedaan signifikan dapat dimaknai bahwa persoalan yang muncul dalam pengelolaan beasiswa bersifat sistemik, bukan kasuistik. Artinya, masalah seperti keterlambatan pencairan, ketidakjelasan informasi, dan lemahnya monitoring tidak hanya dialami oleh kelompok tertentu atau periode tertentu, tetapi menjadi pengalaman yang relatif berulang dalam siklus program. Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi kelembagaan secara menyeluruh.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Bovens (2007), yang menempatkan akuntabilitas sebagai relasi pertanggungjawaban yang harus berlangsung secara konsisten. Akuntabilitas tidak cukup hanya dinilai pada satu tahap pelaksanaan, tetapi harus dilihat sepanjang siklus kebijakan: perencanaan, seleksi, pencairan, monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Oleh karena itu, kesamaan persepsi antara mahasiswa aktif dan alumni menunjukkan bahwa perbaikan program perlu dilakukan secara struktural, bukan hanya administratif.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa Otonomi Khusus bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih merupakan program yang relevan, dibutuhkan, dan sangat dirasakan manfaatnya oleh penerima. Akuntabilitas hasil menjadi kekuatan utama program karena beasiswa membantu kelancaran studi, meringankan beban ekonomi keluarga, meningkatkan motivasi mahasiswa, dan memperkuat kesiapan pengabdian sebagai dokter di Papua.

Namun, program ini masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola implementasi. Masalah yang paling menonjol adalah keterlambatan pencairan dana, belum optimalnya transparansi informasi, belum terintegrasinya basis data penerima, belum konsistennya monitoring akademik, dan belum jelasnya kebijakan ikatan dinas atau pengabdian pasca-kelulusan. Dengan demikian, tantangan utama program bukan pada substansi kebijakan, melainkan pada desain manajerial dan kelembagaan.

Temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian sebelumnya mengenai Dana Otonomi Khusus Papua. Jika penelitian Agustinus (2013) menunjukkan adanya persoalan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan pada tingkat makro, maka penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi pada program spesifik, yaitu beasiswa kedokteran. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat temuan Mulyaningsih et al. (2022) bahwa beasiswa dapat berdampak positif terhadap pendidikan tinggi, tetapi menambahkan bahwa manfaat tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat agar berkelanjutan. Dalam konteks tenaga medis, temuan ini sejalan dengan Noya et al. (2021), Putri et al. (2021), dan Kurniati et al. (2024), yang menekankan pentingnya strategi pengembangan dan retensi tenaga medis berbasis daerah.

Berdasarkan hasil tersebut, reformasi tata kelola beasiswa Otonomi Khusus perlu diarahkan pada lima aspek utama. Pertama, penyusunan jadwal pencairan yang lebih pasti dan disesuaikan dengan kalender akademik. Kedua, penguatan sistem informasi resmi agar mahasiswa dan orang tua memperoleh informasi yang sama dan terpercaya. Ketiga, integrasi basis data penerima antara pemerintah daerah dan Universitas Cenderawasih. Keempat, monitoring akademik berkala terhadap mahasiswa penerima beasiswa. Kelima, perumusan kebijakan pasca-kelulusan yang lebih jelas, termasuk mekanisme ikatan dinas, penempatan, insentif, dan dukungan pengembangan karier.

Dengan perbaikan tersebut, program beasiswa Otonomi Khusus tidak hanya akan berfungsi sebagai bantuan pembiayaan pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia kesehatan di Papua.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, dapat disimpulkan bahwa secara umum program beasiswa ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima, namun belum sepenuhnya optimal dalam seluruh dimensi akuntabilitasnya. Program ini terbukti memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendukung kelancaran studi mahasiswa, meringankan beban ekonomi keluarga, serta meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran. Dengan demikian, secara substantif, beasiswa Otonomi Khusus tetap memiliki relevansi yang tinggi sebagai instrumen kebijakan afirmatif dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia kesehatan di Papua.

Pada dimensi akuntabilitas keuangan, ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan yang cukup menonjol terutama terkait ketepatan waktu pencairan dana dan tingkat transparansi pengelolaan. Meskipun bantuan beasiswa secara umum diterima dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, ketidakpastian dalam waktu penyaluran dana masih menjadi sumber permasalahan yang berdampak pada aktivitas akademik dan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas keuangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian, keterbukaan, dan ketepatan dalam pengelolaan dana publik.

Pada dimensi akuntabilitas proses, pelaksanaan program secara umum sudah memiliki prosedur yang jelas dan dapat dipahami oleh penerima manfaat, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya kejelasan kriteria penetapan penerima, belum konsistennya sistem monitoring dan evaluasi, serta masih adanya keterbatasan integrasi informasi antar lembaga pengelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan beasiswa belum berjalan secara maksimal sehingga mempengaruhi tingkat akuntabilitas proses.

Sementara itu, pada dimensi akuntabilitas hasil, program beasiswa Otonomi Khusus menunjukkan capaian yang sangat baik dan menjadi aspek terkuat dalam penelitian ini. Beasiswa dinilai sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi, meningkatkan motivasi belajar, serta memberikan kesiapan bagi lulusan untuk mengabdikan diri di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa secara nyata program ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat dan berfungsi efektif sebagai instrumen peningkatan akses dan keberhasilan pendidikan kedokteran.

Pada dimensi akuntabilitas kebijakan, program beasiswa ini dinilai sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia kesehatan di Papua serta berkontribusi dalam meningkatkan jumlah lulusan dokter dari Universitas Cenderawasih. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek kebijakan lanjutan, khususnya terkait kejelasan ikatan dinas, mekanisme penempatan lulusan, serta arah pengabdian setelah menyelesaikan studi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya berhenti pada tahap pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga berlanjut pada pemanfaatan hasil pendidikan secara optimal.

Hasil wawancara memperkuat temuan kuantitatif bahwa meskipun program beasiswa Otsus sangat didukung dan dianggap penting untuk dilanjutkan, masih terdapat berbagai permasalahan yang bersifat sistemik. Permasalahan tersebut meliputi keterlambatan pencairan dana, keterbatasan transparansi informasi, belum optimalnya basis data penerima, lemahnya sistem monitoring akademik, serta belum jelasnya kebijakan pasca kelulusan. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada urgensi program, melainkan pada aspek tata kelola dan implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana beasiswa Otonomi Khusus bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih sudah berada pada arah yang positif, namun masih membutuhkan penguatan yang serius terutama pada aspek manajerial, administratif, dan keberlanjutan kebijakan agar tujuan utama program dalam mencetak tenaga dokter putra-putri Papua dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kualitas pengelolaan program beasiswa Otonomi Khusus perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi oleh seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah daerah sebagai pengelola utama program perlu memperkuat sistem tata kelola khususnya pada aspek pencairan dana, integrasi data, dan transparansi informasi. Penjadwalan pencairan dana sebaiknya disusun lebih pasti dan disesuaikan dengan kalender akademik mahasiswa agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Selain itu, pengembangan sistem basis data terpadu yang terhubung dengan universitas menjadi penting untuk menghindari duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan kanal informasi resmi yang mudah diakses oleh mahasiswa dan orang tua agar komunikasi terkait status beasiswa menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mengurangi ketidakpastian informasi.

Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih juga memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas program, khususnya dari sisi akademik dan monitoring. Fakultas perlu mengembangkan sistem pemantauan yang lebih terstruktur terhadap perkembangan studi mahasiswa penerima beasiswa, termasuk capaian akademik, keaktifan perkuliahan, serta kebutuhan administratif mahasiswa. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar informasi terkait mahasiswa dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan, sehingga pengambilan keputusan terkait beasiswa dapat dilakukan secara lebih tepat.

Dari sisi mahasiswa penerima beasiswa, diperlukan peningkatan kesadaran bahwa beasiswa Otonomi Khusus bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga bentuk investasi daerah dalam pengembangan sumber daya manusia Papua. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan bantuan secara bertanggung jawab, aktif dalam memenuhi kewajiban administrasi, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak pengelola dan institusi pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan studi dan berkontribusi kembali dalam pembangunan kesehatan di Papua.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan jumlah responden yang lebih besar serta melibatkan lebih banyak institusi pendidikan di Papua agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih kuat. Penelitian selanjutnya juga dapat difokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang program beasiswa, terutama terkait efektivitas kebijakan pasca kelulusan, distribusi lulusan di wilayah Papua, serta kontribusi nyata lulusan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai beasiswa Otonomi Khusus tidak hanya berhenti pada aspek implementasi, tetapi juga mencakup dampak strategis terhadap pembangunan daerah.

References

- Agustinus, J. (2013). Phenomenology study on financial performance and management accountability of special autonomy funds allocated for education at the province of Papua, Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 15(1), 79–94. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5403>

- Agustinus, J. (2015). Accountability perspective: Implementation and reporting on spending fund of Papua special autonomy. *Information Management and Business Review*, 7(2), 79–86. <https://doi.org/10.22610/imbr.v7i2.1142>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs. *Health Services Research*, 48(6 Pt 2), 2134–2156. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112–133. <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>
- Kim, T. K. (2015). T test as a parametric statistic. *Korean Journal of Anesthesiology*, 68(6), 540–546. <https://doi.org/10.4097/kjae.2015.68.6.540>
- Kurniati, A., Efendi, F., Widowati, A. R., et al. (2024). What medical specialists want to stay in remote areas of Indonesia. *PLOS ONE*, 19(8), e0308225. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308225>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyaningsih, T., Dong, S., Miranti, R., Daly, A., & Purwaningsih, Y. (2022). Targeted scholarship for higher education and academic performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 88, 102510. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102510>
- Noya, F., Carr, S., Thompson, S., Clifford, R., & Playford, D. (2021). Rural and remote medical workforce in Indonesia. *Human Resources for Health*, 19, 126. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00667-z>
- Palinkas, L. A., et al. (2015). Purposeful sampling for qualitative research. *Administration and Policy in Mental Health*, 42, 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2021). Special autonomy policy evaluation in Papua. *International Journal of Excellence in Government*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.1108/IJEG-06-2019-0011>
- Putri, L. P., Russell, D. J., O’Sullivan, B., & Kippen, R. (2021). Factors associated with working in remote Indonesia. *Frontiers in Medicine*, 8, 594695. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.594695>
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>